

# Hasil Laporan Evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017

Penilaian		Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
<b>A. PROSES (60).</b>				<b>54.41</b>	<b>90.69%</b>	
<b>I.Manajemen Perubahan</b>				<b>5</b>	<b>100%</b>	
<b>1. Tim Reformasi Birokrasi</b>				<b>1</b>	<b>100%</b>	
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		Kepwal no 208 Th 2016 tgl 11 feb 2016 ttg pembentukan Tim pengarah kebijakan RB Pemkot Yk Th 2016, Kep Kabag Organisasi Setda Kota Yk no 17/KLBG-ORG/2016 Tgl 18 Feb 2016 Ttg Pembentukan Tim Mindset & Culture Set Aparatur RB Pemkot Yk th 2016
b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A	1		Laporan hasil capaian pelaksanaan tugas tim RB Tahun 2016
c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A	1		laporan monitoring semesteran dan laporan evaluasi tahunan Tahun 2016
<b>2. Road Map Reformasi Birokrasi</b>				<b>1</b>	<b>100%</b>	
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.

	b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.
	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Keputusan Walikota Yogyakarta No. 406/KEP/2013 ttg Penetapan Road Map RB Th. 2012 s/d 2016 di Lingkungan Pemkot Yk.
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A	1		SK Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2016
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		Terlaksananya workshop budaya kerja pd 10 Februari 2016 dan 20 April 2016
<b>3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</b>					<b>2</b>	<b>100%</b>	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1		Kepwal No. 95 th 2016 ttg Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PMPRB pada Inspektorat Kota Yogyakarta, Dokumen tatakala kegiatan PMPRB Tahun 2016, KAK Kegiatan PMPRB
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A	1		Notulen rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PMPRB, rapat koordinasi melibatkan seluruh SKPD/ unit kerja pengampu 8 area perubahan dalam RB Tahun 2016
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A	1		Saat ini untuk PMPRB sistem baru hanya terdapat 2 asesor yaitu di Inspektorat selaku penilai dan di Sekretariat Daerah selaku pelaksana, personil yang ditunjuk untuk keduanya sudah mendapat pelatihan pada 2012
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A	1		Kepwal No. 95 th 2016 ttg Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PMPRB pada Inspektorat Kota Yogyakarta, SK Inspektur Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan sebagai Asesor

	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan revidi terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator assessor telah melakukan revidi terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan revidi terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan revidi kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A	1		Kertas kerja revidi hasil evaluasi pelaksanaan RB th 2016, Kertas Kerja Sinkronisasi PMPRB Tahun 2016
	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor	A	1		Notulen rapat koordinasi penilaian RB Tahun 2016
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A	1		Laporan hasil evaluasi dan TL RB, hasil monev RB, rapat koordinasi evaluasi : notulen, undangan
<b>4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja</b>					1	100%	
	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	1		Perwal budaya pemerintahan 58 tahun 2015 tentang budaya pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap SKPD mempunyai kelompok kerja budaya pemerintahan, SE Nomor : 130/87/SE/2015 tentang budaya pemerintahan
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A	1		rapat dinas, rapat terbatas, Bimtek RB, dimasukkan web jogjakota.go.id sub domain organisasi@jogjakota.go.id
	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A	1		Perwal Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen perubahan Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan pelatihan Agent of Change bagi SKPD pada bulan Agustus 2014
		<b>Rencana Aksi</b>	1) Melaksanakan evaluasi manfaat "agen perubahan" menggunakan alat ukur yang sesuai. 2) Melaksanakan perubahan Kepwal Yk tentang Aagen Perubahan sbg tindak lanjut dari perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 3) Menambah agen perubahan pada masing-masing OPD. 4) Melaksanakan identifikasi lingkungan kerja dan menyusun rencana aksi. 5) Melaksanakan Workshop Agen Perubahan.				
<b>II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>						2.71	54.25%
<b>1. Harmonisasi</b>						1.25	50%

	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	B	0.5		Hasil inventarisasi & pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron
	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	B	0.5		Data rekapitulasi produk hukum daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan Kesepakatan Prolegda Tahun 2016
<b>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan</b>					1.46	58.5%	
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	B	0.67		SOP produk hukum (Kept Kabag Hukum)
	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	B	0.5		Data hasil evaluasi th 2015, utk tahun 2016 tidak dilakukan evaluasi
<b>Rencana Aksi</b>			1. melaksanakan pendataan produk hukum yang berupa perda dan perwal yg masih berlaku 2. menyusun perwal ttg proses penyusunan produk hukum daerah untuk level kota sesuai dg Permendagri no 80 th 2015 3. melaksanakan Bimtek Regulatory Impact Assesment ttg Harmonisasi Produk Hukum 4. melaksanakan harmonisasi produk hukum				
<b>III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>					6	100%	
<b>1. Evaluasi</b>					3	100%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		Dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah, Perda No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Perwal Tentang Tugas Pokok Fungsi
	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A	1		Dokumen evaluasi rincian tugas, dan pembahasan evaluasi kelembagaan
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, laporan tahunan evaluasi kelembagaan, draft perwal rincian tugas, hasil mapping tupoksi
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, laporan tahunan evaluasi kelembagaan, draft perwal rincian tugas, hasil mapping tupoksi

	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A	1		Perwal Nomor..... Tahun 2016 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta	
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		Dokumen Hasil Analisis Berbasis Kerja, dokumen hasil evaluasi kelembagaan, draft perda kelembagaan	
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A	1		terlaksananya evaluasi rincian tugas , dan pembahasan evaluasi kelembagaan	
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan.	
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1		Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan.	
2. Penataan						3	100%	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		Perda No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	
<b>Rencana Aksi</b>			1) Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan disesuaikan dengan RPJMD. 2) Melaksanakan Evaluasi Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.					
<b>IV.PENATAAN TATALAKSANA</b>						4.88	97.53%	
1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama						1.38	91.75%	
	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	B	0.67		Peta Proses Bisnis 20 SKPD	
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A	1		SOP sd th 2016 sebanyak 4186 utk SKPD dan 1053 utk sekolah, yg telah ditetapkan dg kept Ka SKPD/Unit Kerja, dan Kepwal utk SOP yg lintas SKPD	
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	1		SOP sd th 2016 sebanyak 4186 utk SKPD dan 1053 utk sekolah, yg telah ditetapkan dg kept Ka SKPD/Unit Kerja, dan Kepwal utk SOP yg lintas SKPD	

	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A	1		Hasil Monev SOP terhadap 10 SKPD pada Tahun 2016
<b>2. E-Government</b>					2	100%	
	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		perwal nomor 15 tahun 2015 ttg E-Government
	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		SIM Pelaporan (integrasi antara SIPKD dan SIM Anggaran untuk anggaran perubahan, Pengembangan SIMPEG, Pembangunan aplikasi talent pool masih dalam penyempurnaan untuk diintegrasikan
	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		Pembangunan web BPBD, Pembangunan web PPID, Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan statis dan integrasi database Laporan Kinerja Daerah
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		Pengembangan SISMIO, Pengembangan Mapatda (modul BPHTB), Pembangunan E Tax hotel dan Restoran
<b>3. Keterbukaan Informasi Publik</b>					1.5	100%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		keputusan sekda Nomor 19 tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		dapat diakses melalui website Pemkot Yk (jogjakota.go.id), kep. Sekda, masuk di sub domain. Penyempurnaan tampilan, web jogjakota.go.id
	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		Hasil Monev Triwulanan Tahun 2016
<b>Rencana Aksi</b>			1) Melaksanakan evaluasi proses bisnis. 2) Melaksanakan Workshop proses bisnis untuk OPD baru. 3) Melaksanakan perubahan Perwal tentang penyusunan proses bisnis. 4) Melaksanakan evaluasi SOP dengan menyederhanakan nama jabatan.				
<b>V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>					14.14	94.25%	

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1		"Hasil Anjab konversi berdasarkan PP 8 Tahun 2016 - Kepwal 188 RS Pratama 16 - Kepwal 213 Kecamatan 16 - Kepwal 214 Dinkes 16 - Kepwal 226 RSUD 16 - Kepwal 247 Arpusda 2016 - Kepwal 248 KPMP - Kepwal 249 Kantor KB 2016 - Kepwal 399 Set DPRD - Kepwal 422 Dindukcapil 16 - KEPWAL 458 JFT - Kepwal 483 Dinas Parbud 16 - Kepwal 484 BLH - Kepwal 488 Tahun 2016 (Dintib) - Kepwal 489 Inspektorat 16 - Kepwal 490 Tahun 2016 (Dinas Perizinan) - Kepwal 227 Bappeda 16 - Kepwal 338 Bappeda 16 - Kepwal 452 DPDPK 16 - Kepwal 458 Kimpraswil 16"
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1		"Hasil Anjab konversi berdasarkan PP 8 Tahun 2016 - Kepwal 188 RS Pratama 16 - Kepwal 213 Kecamatan 16 - Kepwal 214 Dinkes 16 - Kepwal 226 RSUD 16 - Kepwal 247 Arpusda 2016 - Kepwal 248 KPMP - Kepwal 249 Kantor KB 2016 - Kepwal 399 Set DPRD - Kepwal 422 Dindukcapil 16 - KEPWAL 458 JFT - Kepwal 483 Dinas Parbud 16 - Kepwal 484 BLH - Kepwal 488 Tahun 2016 (Dintib) - Kepwal 489 Inspektorat 16 - Kepwal 490 Tahun 2016 (Dinas Perizinan) - Kepwal 227 Bappeda 16 - Kepwal 338 Bappeda 16 - Kepwal 452 DPDPK 16 - Kepwal 458 Kimpraswil 16"
	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		Dokumen Perencanaan Penataan Pegawai Dalam Rangka Penerapan OPD Baru
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		Printscreen E- Formasi 2016
	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Printscreen E- Formasi 2016; E-Formasi pada Kementerian PAN-RB Per 30 September 2016; Penataan Pegawai dalam Formasi 19 Kolom
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN					2	100%	

	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Printscreen media/jejaring sosial yang memuat Pengumuman Ketua Tim Pengadaan CPNS Pemkot Yk Tahun 2014 Nomor 800/3278 tgl 1 September 2014 ttg Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Yk Th 2014
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Printscreen fitur web yang menampilkan blanko pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran Blangko Registrasi Pendaftaran CPNS
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Printscreen web/copy Naskah dinas yang memuat persyaratan administrasi dan kompetensi; persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat termuat di Pengumuman
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Dokumen adanya komitmen atau berita acara penggunaan CAT antara user (Pemkot Yk) dengan vendor/provider (BKN) untuk pengadaan tahun 2010 Perjanjian Kerjasama antara Pemkot dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yk nomor 01/SPK/CPNS/2014 tanggal 25 september 2014
	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Printscreen web yang memuat Pengumuman hasil seleksi Dimuat di Jawa Pos dan Tribun Jogja tanggal 12 Desember 2014, Web Pemkot serta di papan pengumuman BKD
<b>3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</b>					0.78	78%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		"1. Perwal No.97 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pemkot Yk 2. Perwal No.45 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JPT Pratama Pemkot Yk"



		b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai			B	0.67		- Terbentuknya tim penilai kompetensi dengan Kepwal no 281 tahun 2016 Tentang Tim Penilai Kompetensi di Pemkot Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Surat Perintah Tugas Pegawai yang mengikuti Penilaian Kompetensi Surat Perintah Tugas Pegawai yang mengikuti Penilaian Kompetensi Surat Perintah Tugas Pegawai yang mengikuti Penilaian Kompetensi
				a. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan <i>assessment</i> pegawai					
		c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	B	0.67		Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat (diklatpim dan diklat teknis), termasuk peningkatan kualifikasi pendidikan	
		d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	B	0.67		DPA BKD pada Bidang Diklat dan rencana pelaksanaan diklat tahun 2016	
		e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	B	0.67		Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat (diklatpim dan diklat teknis), termasuk peningkatan kualifikasi pendidikan; laporan pelaksanaan diklat 2016	
		f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		"Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala: Melaksanakan Evaluasi Alumni Diklat 1. Diklat Penguatan Pengawas Sekolah 2. Diklat Pengelola Kepegawaian 3. Diklat Pengelola Kegiatan 4. Diklat BKO Trantib Kriteria Monev: 1. Apakah YBS masih menjabat sesuai dengan diklat 2. Apakah sudah menerapkan hasil diklatannya "	
			<b>4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka</b>				6	100%	
		a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1			"Perwal No 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan Perwal No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal No 63 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka "

	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A	1		Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		"Kepwal No 434 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi JPT Pratama di Pemkot Kepwal No 259 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama Pemkot Yk Tahun 2016 Nama dan Jabatan anggota Tim Seleksi termuat dalam lampiran Kepwal "
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		Tahapan Pengumuman
<b>5. Penetapan kinerja individu</b>					1.36	67.86%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A	1		SKP; Penilaian Kinerja Pegawai (semesteran) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai th 2016
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		Naskah dinas yang memuat kebijakan dan atau prosedur penerapan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (SKP) Surat Edaran Sekda Nomor 863/2/SE/2014 tanggal 8 Januari 2014 dan SE Sekda Nomor 863/21/SE/2015 tanggal 25 Februari 2015
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A	1		SKP dan Penilaian SKP 2016
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	D	0.25		Penilaian SKP tahun 2016

e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.					B	0.5		"Naskah dinas kebijakan/prosedur/hasil monev atas pencapaian kinerja individu; nama, nomor dan tanggal naskah dinas berupa : Rangkuman Monev PP 46 tahun 2011 Untuk Tahun 2014 yang dibuat Awal tahun 2015, dibuat oleh Tim Monev SKP, isinya penyamaan persepsi SKP "
				a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu					
f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu			a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	A	1		"Checklist / aturan persyaratan Proses Kenaikan Pangkat JFU, JFT maupun JS dan Seleksi Terbuka JPT "	
g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja			a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	D	0		belum diterapkan tunjangan kinerja di Pemkot Yk	
<b>6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai</b>						1	100%		
a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan			ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 76 Th 2004 ttg Penetapan Kode Etik Pemerintah Kota Yk Perwal Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Budaya Pemeintahan Dilingkungan Pemkot Yk	
b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		Rekapitulasi Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Diplin; pembacaan kode etik pegawai tiap kali apel bersama dan upacara di balaikota	
c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi			a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Undangan Rapat, Daftar hadir dan Notulen Rapat Koordinasi dengan OPD; hasil sidak Inspektorat 2016	
d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )			a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada unit organisasi	A	1		Penghitungan pemberian TPP dan Rekapitulasi Pemberian sanksi / Penjatuhan Hukuman Disiplin	
<b>7. Pelaksanaan evaluasi jabatan</b>						1	100%		
a	Informasi faktor jabatan telah disusun			Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		7 dokumen informasi jabatan	

	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		peta jabatan untuk 48 SKPD
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		job grading telah dibuat rekapitulasi utk dikirim ke kemen PAN & RB
<b>8. Sistem Informasi Kepegawaian</b>					1	100%	
	a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		"Printscreen SIMPEG dan SIM Presensi; jumlah jenis layanan/fitur 5 (sesuai jumlah layanan dalam manajemen SDM) Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ), Rekapitulasi, Nominatif, Daftar Riwayat Pekerjaan, grafik "
	b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Peraturan Walikota Yk Nomor 58 Th 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Yk.
	c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1		SIMPEG dan SIM Presensi
	d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		"SK Pengangkatan Jabatan Struktural / Fungsional Penerbitan SK Penataan pegawai Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Penerbitan SK Pensiun dll"
<b>Rencana Aksi</b>			1.Melaksanakan Asesment untuk golongan IIIb keatas 2.Melaksanakan Asesment ulang untuk calon JPT 3.Melaksanakan Tunjangan Kinerja				
<b>VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>					5.74	95.6%	
<b>1. Keterlibatan pimpinan</b>					2	100%	
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Perda No 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016, notulen daftar hasil koord penyusunan renstra
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Dokumen Perjanjian Kinerja

	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Pengukuran kinerja dan Renja Triwulanan
<b>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>					3.74	93.4%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1		"- Scan Pendampingan Renja 2016 - diklat LAKIP tahun 2015"
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		"- Perwal Kota YK No.2 Tahun 2015 ttg Penyusunan Perjanjian Kinerja, LAKIP, tata cara review LKJ - Perwal No 112 Thn 2016 ttg Pedoman pelaksanaan APBD - Perwal No 65 Thn 2015 Pedoman Pelaksanaan PBJ - Perwal 111 Thn 2016 ttg Standar Belanja - Perwal 110 Thn 2016 ttg SHBJ - Perwal sisdur pengelolaan Keuangan"
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	B	0.67		Printscreen SIM e-Lakip dan SIM Lapbul Dalbang
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		SIM e-Lakip
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		Laporan bulanan pada SIM pelaporan Bag. Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk
	<b>Rencana Aksi</b>		1. Melaksanakan penyusunan dan penyalarsan RPJMD. 2. Cascading perencanaan OPD. 3. Integrasi SIM SAKIP. 4. Melaksanakan Asistensi/pendampingan Indikator Kinerja. 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Akuntabilitas.				
<b>VII. Penguatan Pengawasan</b>					10.28	85.69%	
<b>1. Gratifikasi</b>					1.35	90%	
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Perwal Yk no 82 th 2013 ttg Pedoman Pengendalian Gratifikasi
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	B	0.5		Sosialisasi gratifikasi & anti korupsi th 2016 dengan audiens LPMK, PKK dan Komite Sekolah; Sosialisasi di sekolah-sekolah berdasarkan permintaan sekolah

	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		Kepwal no 93 th 2016; laporan semesteran pengendalian gratifikasi th 2016
	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya	1		laporan monev implementasi pengendalian gratifikasi th 2016
	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya	1		laporan TL penanganan gratifikasi th 2016
<b>2. Penerapan SPIP</b>					1.34	89%	
	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Keputusan Walikota No. 482 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, Perwal No.61 Th.2010 tentang Penyelenggaraan SPIP
	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Kepwal Yk no 76 tahun 2004 ttg Kode Etik Pegawai; Perwal Yk no 39 tahun 2012 ttg Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemkot Yk; Kepwal no 306 th 2016 ttg Pembentukan Satgas SPIP Pemkot Yk ; Satgas SPIP di seluruh SKPD
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	B	0.67		Dokumen hasil penilaian risiko ; Dokumen hasil monev SPIP Th 2016
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B	0.67		Dokumen RTP, Dokumen hasil monev SPIP th 2016
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		laporan sosialisasi/ workshop SPIP
	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		dok penilaian maturitas SPIP; laporan monev SPIP
<b>3. Pengaduan Masyarakat</b>					2	100%	
	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		Perwal Yk no 38 th 2009 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat; Perwal Yk no 77 th 2009 Ttg UPIK

	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		SOP Unit Pengelola Informasi dan Keluhan, SOP Kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		Laporan bulanan Pengaduan melalui UPIK dan Laporan bulanan PPI tahun 2016; Rekapitulasi data UPIK th 2016
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Dokumen hasil monev penanganan pengaduan, koordinasi berkala kemajuan PPI th 2016
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Rekapitulasi TL monev PPI; contoh SPT tindak lanjut hasil PPI
<b>4. Whistle-Blowing System</b>						0.7	46.6%
	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		Kepwal Yk no 404 th 2016 ttg WBS
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	C	0.33		Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi; baru sebagian kecil : pada forum koordinasi, konsultasi, pelaksanaan audit
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		Print sreen WBS
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	C	0		Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	D	0		Belum ada bukti dukung
<b>5. Penanganan Benturan Kepentingan</b>						1.15	76.6%
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya	1		Perwal Yk No.17 Th.2015 tentang pengaturan benturan kepentingan di Pemkot Yogyakarta
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A	1		laporan sosialisasi
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya	1		SKPD membuat identifikasi benturan kepentingan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	B	0.5		laporan monev implementasi benturan kepentingan th 2016

	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	C	0.33		Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
<b>6. Pembangunan Zona Integritas</b>					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Dokumen penancangan ZI tgl 12 Juli 2012
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		Kepwal Yk no... th 2016 Penunjukan 9 SKPD sebagai sampling/ percontohan ZI
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		Kepwal Yk No 93 Tahun 2016 Tim pendamping ZI; laporan rapat2 koordinasi / workshop pembangunan ZI
	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Kepwal Yk no 93 Th 2016 Tim penilai internal ZI; Hasil penilaian TPI th 2016
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		Telah ada 2 SKPD yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang mendapat penghargaan dari KemenPAN RB sebagai berpredikat WBK ; Bukti Piagam WBK utk KPTP dan Dinzin
<b>7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>					1.5	100%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan th 2016
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A	1		Dokumen hasil penilaian leveling APIP; data SDM dan Diklat APIP th 2016; data nominatif th 2016
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A	1		DPA Perubahan Inspektorat th 2016; laporan kegiatan bidang th 2016; laporan AKIP Inspektorat th 2016
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A	1		PKPT th 2016; Kegiatan klinik Konsultasi th 2016



		<b>Rencana Aksi</b>	1. melaksanakan sosialisasi WBS. 2. menyusun model evaluasi benturan kepentingan. 3. melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan. 4. melaksanakan optimalisasi monitoring dan evaluasi SPIP.				
<b>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					5.67	94.47%	
<b>1. Standar Pelayanan</b>					0.67	66.8%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Perwal 37 Tahun 2016
	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	B	0.67		s/d 2016 telah tersusun 4186 SOP di skpd dan 1053 SOP di sekolah, penerapan SPM pd 20 skpd; rekap SPP Pemkot Tahun 2016
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	B	0.67		penerbitan SPP pada setiap SKPD yanlik, implementasi SPIP, SOP dan SPP yang telah disusun
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		Perwal 37 Tahun 2016
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	B	0.5		SOP Revisi Tahun 2016
<b>2. Budaya Pelayanan Prima</b>					1	100%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A	1		Laporan kegiatan (forkompanda, sosialisasi budayakerja, workshop pelayanan publik, workshop PPK BLUD)+H30
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		jogjakota.go.id, media cetak info kota, dialog interaksi di TV lokal dan acara radio Walikota Menyapa setiap senin dan kamis, info layanan di setiap unit layanan pada papan informasi, banner, leaflet
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		Perda Pelayanan Publik, Perwal juklak pelayanan publik

	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A	1		Perwal nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perizinan yang terpadu pada dinas perizinan, pelayanan di Dinsosnakertrans dalam 1 atap, PATEN di Kecamatan, pelayanan di Dindukcapil, pelayanan di Dinas Kesehatan
	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		Dokumen inovasi layanan sebanyak 120 ide inovasi tersebar pada 48 SKPD
<b>3. Pengelolaan Pengaduan</b>					1.5	100%	
	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		website upik.jogjakota.go.id, kotak aduan di setiap unit layanan, sms 08122780001
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		SOP UPIK dan PPIID
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		Perwal nomor 77 Tahun 2009 ttg Pelayanan Informasi dan Keluhan pada UPIK Kota Yk
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A	1		SOP UPIK, Dokumen hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Dokumen evaluasi atas penanganan keluhan dan aduan tribulanan
<b>4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>					1.5	100%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		rekapitulasi hasil pengukuran IKM dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1		jogjakota.go.id di bagian Tautan lalu dapat klik di IKM 2016 dan papan informasi di masing-masing SKPD/unit kerja
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Notulen koordinasi tindak lanjut hasil survei
<b>5. Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>					1	100%	
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Perwal 15 tahun 2015 tentang E-Gov

	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1		perizinan lewat perizinan.jogjakota.go.id, Pelayanan Pajak Daerah, Permohonan pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil on line, Pelayanan Puskesmas, Retribusi Sampah, Retribusi Asenering, Pelayanan Pedagang Pasar, E-ticketing Taman Pintar, Pengurusan Kartu Pencari Kerja Dinas Tenaga Kerja	
	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Laporan Pelaksanaan Pengelolaan TI Tahun 2016	
		<b>Rencana Aksi</b>	1. Melaksanakan penyusunan perwal tentang reward dan punishment pelayanan untuk pelaksana pelayanan. 2. melaksanakan evaluasi SOP pelayanan publik.					
<b>B.HASIL</b>						<b>29.58</b>	<b>73.95%</b>	
<b>I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>						<b>14.04</b>	<b>70.19%</b>	
		1.Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	70.27	9.84		Hasil evaluasi dan validasi Menpan & RB	
		2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	3.5	4.2		Dokumen penilaian SPEKOP	
		<b>Rencana Aksi</b>	1. Meningkatkan sistem AKIP. 2. Melakukan survey internal secara berkelanjutan untuk menilai kapasitas organisasi.					
<b>II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN</b>						<b>7.59</b>	<b>75.93%</b>	
		1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	2.91	5.0925		Hasil survey integritas sektor publik tahun 2013 oleh Litbang KPK RI	
		2.Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelasan Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	WTP-Dengan Paragraph Penjelasan	2.5		LHP BPK RI No. 19/LHP/XVIII.YOG/05/2016	
		<b>Rencana Aksi</b>	1. Bekerjasama dengan lembaga independen/permohonan kepada KPK untuk dilakukan survey menilai IPK. 2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan barang agar dicapai opini WTP tanpa Paragraph Penjelasan.					
<b>III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>7.95</b>	<b>79.5%</b>	
		1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.18	7.95		IKM Pemerintah Kota Yk Tahun 2016	
		<b>Rencana Aksi</b>	Meningkatkan nilai persepsi kualitas pelayanan publik pada OPD Pelayanan publik dengan mengevaluasi hasil IKM yang masih rendah/kurang.					
<b>INDEKS RB (Total)</b>						<b>83.99</b>		

\*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di isnpektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi

3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB